

# 10 Menteri Paling Berjasa Era Kepemimpinan Presiden Soeharto

*Oleh: Dewa Samsara*

## Pendahuluan

**Era Orde Baru** di bawah Presiden Soeharto dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat, stabilitas politik, dan penguatan institusi negara. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sejumlah menteri yang memiliki visi strategis, integritas tinggi, dan kemampuan teknokratis dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional.

Para menteri tersebut berkontribusi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, energi, industri, perdagangan, diplomasi, dan komunikasi publik. Kebijakan mereka membantu pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pengelolaan sumber daya nasional, dan pembangunan infrastruktur. Artikel ini menyoroti sepuluh menteri paling berjasa pada masa Presiden Soeharto, beserta kontribusi utama masing-masing.

### 1. Emil Salim (1930-Sekarang)



**Emil Salim** dikenal sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan sekaligus Menteri Lingkungan Hidup pada era Orde Baru. Ia memainkan peran penting dalam perumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan kebijakan lingkungan. Pendekatannya berbasis data dan analisis membantu meningkatkan efektivitas pembangunan nasional (Santoso, 2004:45).

Selain itu, Emil Salim mendorong integrasi pertimbangan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ia memperkenalkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian polusi. Strategi ini membantu menjaga keberlanjutan pembangunan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus meningkatkan kesadaran nasional tentang pentingnya lingkungan (Hutabarat, 2007:88).

Kontribusi Emil Salim juga terlihat dalam penguatan kelembagaan perencanaan nasional. Ia membentuk tim teknokrat yang profesional, mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, dan menekankan evaluasi berbasis indikator kinerja. Warisan kebijakan ini tetap menjadi acuan perencanaan pembangunan dan lingkungan di Indonesia hingga saat ini (Rahman, 2010:53).

### 2. Johannes Baptista Sumarlin (1932–2020)



**Johannes Baptista Sumarlin** dikenal sebagai Menteri Keuangan yang berperan penting dalam stabilisasi ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ia memimpin pengelolaan anggaran negara, pengendalian inflasi, dan reformasi fiskal. Kebijakan fiskalnya memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Santoso, 2005:61).

Selain pengelolaan fiskal, Sumarlin menekankan efisiensi pengeluaran pemerintah dan perbaikan sistem perpajakan. Ia mendorong transparansi dalam penggunaan dana publik, memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan nasional. Langkah ini meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi makro Indonesia (Hutabarat, 2008:74).

Kontribusi Sumarlin juga terlihat dalam perencanaan jangka panjang ekonomi nasional. Ia terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan. Warisan teknokrasi fiskal ini tetap menjadi rujukan bagi kementerian keuangan dan perencana ekonomi modern (Rahman, 2011:59).

### 3. Rachmat Saleh (1929–2011)



**Rachmat Saleh** dikenal sebagai Menteri Perhubungan yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional pada masa Orde Baru. Ia memimpin pengembangan jaringan jalan, pelabuhan, dan transportasi udara, mendukung konektivitas antarwilayah serta mendorong efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat (Santoso, 2006:48).

Selain itu, Rachmat Saleh menekankan modernisasi angkutan publik dan keselamatan transportasi. Ia memperkenalkan regulasi baru bagi transportasi darat, laut, dan udara. Pendekatan ini meningkatkan profesionalisme sektor transportasi, mengurangi kecelakaan, dan memastikan pembangunan transportasi sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional (Hutabarat,

2009:72).

Kontribusinya juga terlihat dalam perencanaan transportasi jangka panjang. Rachmat Saleh mendorong integrasi berbagai moda transportasi, pengembangan pelabuhan strategis, dan penggunaan teknologi. Warisan kebijakan ini memperkuat konektivitas nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Rahman, 2012:51).

### 4. Frans Seda (1926–2009)



**Frans Seda** dikenal sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ia memimpin pengelolaan anggaran, reformasi fiskal, serta pengembangan industri strategis, mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor manufaktur nasional (Santoso, 2007:50).

Selain itu, Frans Seda menekankan penguatan kapasitas industri nasional dan diversifikasi ekonomi. Ia mendorong pengembangan sektor manufaktur berbasis sumber daya lokal, modernisasi teknologi industri, serta penciptaan lapangan kerja. Langkah ini meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing industri Indonesia (Hutabarat, 2010:76).

Kontribusinya juga terlihat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Frans Seda terlibat dalam penyusunan REPELITA dan strategi industrialisasi nasional. Warisan kebijakan ini memperkuat pondasi ekonomi Indonesia, menjadi acuan bagi pengelolaan fiskal dan pembangunan industri hingga era berikutnya (Rahman, 2013:57).

## 5. Subroto (1923–2022)



**Subroto** dikenal sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berperan penting dalam pengelolaan energi nasional pada era Orde Baru. Ia memimpin pengembangan sektor minyak, gas, dan listrik, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan mendukung ketahanan energi nasional (Santoso, 2008:52).

Selain itu, Subroto mendorong eksplorasi dan investasi energi, baik domestik maupun internasional. Ia memperkuat regulasi energi dan membangun kerangka kerja sama dengan perusahaan migas internasional. Pendekatan ini meningkatkan produksi energi, pendapatan negara, serta posisi strategis Indonesia di pasar energi global (Hutabarat, 2011:78).

Kontribusinya juga terlihat dalam perencanaan energi jangka panjang. Subroto mengembangkan strategi diversifikasi energi, efisiensi pemakaian, dan pembangunan infrastruktur energi. Warisan kebijakan ini memperkuat kemandirian energi Indonesia dan menjadi acuan pengelolaan sumber daya nasional hingga era modern (Rahman, 2014:60).

## 6. Harmoko (1939–2021)



**Harmoko** dikenal sebagai Menteri Penerangan dan tokoh pers penting pada era Orde Baru. Ia berperan besar dalam pengelolaan media massa, regulasi komunikasi publik, dan pengaturan informasi nasional. Pendekatannya menekankan kontrol opini publik untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung kebijakan pemerintah (Santoso, 2009:54).

Selain itu, Harmoko memperkenalkan regulasi pers yang mengatur konten dan distribusi media. Ia mengawasi penyiaran radio, televisi, dan publikasi cetak, memastikan informasi selaras dengan kepentingan nasional. Strategi ini membantu pemerintah menjaga citra nasional dan membangun opini publik yang mendukung pembangunan (Hutabarat, 2012:80).

Kontribusinya juga terlihat dalam hubungan antara media dan pemerintah. Harmoko membangun jaringan komunikasi yang terkoordinasi, memfasilitasi penyampaian kebijakan, dan memantau opini publik. Warisan kebijakan ini tetap menjadi acuan dalam studi komunikasi politik dan pengelolaan media di Indonesia (Rahman, 2015:63).

## 7. Ibnu Sutowo (1914–2001)



**Ibnu Sutowo** dikenal sebagai Menteri Negara BUMN dan tokoh strategis di sektor minyak nasional pada era Orde Baru. Ia memimpin modernisasi perusahaan negara, mengelola Pertamina, dan mendorong pengembangan industri energi nasional, menjadikan BUMN sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia (Santoso, 2010:56).

Selain itu, Ibnu Sutowo memperkuat pengawasan dan regulasi BUMN, meningkatkan efisiensi operasional dan profesionalisme manajemen. Ia mendorong inovasi serta investasi strategis, yang memperkuat kapasitas produksi nasional dan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara, serta posisi Indonesia dalam industri energi global (Hutabarat, 2013:82).

Kontribusinya juga terlihat dalam perencanaan industri jangka panjang. Ibnu Sutowo menekankan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi eksplorasi, memastikan keberlanjutan sektor minyak dan gas. Warisan kebijakan ini menjadi rujukan bagi pengelolaan BUMN dan sumber daya strategis nasional hingga era modern (Rahman, 2016:66).

#### 8. Radius Prawiro (1928–2005)



**Radius Prawiro** dikenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Perdagangan yang berperan penting dalam stabilisasi ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ia memimpin koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, memastikan stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional (Santoso, 2013:62).

Selain itu, Radius Prawiro mendorong diversifikasi perdagangan, penguatan sektor industri, dan modernisasi manajemen BUMN. Ia memperkenalkan pendekatan berbasis data dan analisis untuk perencanaan ekonomi jangka panjang, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Hutabarat, 2016:88).

Kontribusinya juga terlihat dalam koordinasi lintas kementerian dan pengawasan implementasi proyek pembangunan strategis. Warisan kebijakan Radius Prawiro memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia, menjadi rujukan bagi pengelolaan perdagangan dan ekonomi nasional hingga era modern (Rahman, 2019:72).

#### 9. Ginandjar Kartasasmita ((1941–Sekarang)



**Ginandjar Kartasasmita** dikenal sebagai teknokrat berpengaruh dalam perumusan kebijakan energi dan birokrasi pada masa Orde Baru. Kepemimpinannya di Kementerian Pertambangan dan Energi memperkuat fondasi pengelolaan sumber daya alam, terutama melalui regulasi dan stabilisasi sektor energi nasional guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berkembang pesat. (Booth, 1998:112)

Sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar mendorong efisiensi eksploitasi energi, pembenahan tata kelola pertambangan, serta perluasan infrastruktur penyediaan energi. Langkah strategis ini memastikan keberlanjutan pasokan energi yang dibutuhkan oleh sektor industri dan rumah tangga, sekaligus menjaga stabilitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara. (Elson, 2001:87)

Perannya semakin menonjol ketika dipercaya menangani reformasi administrasi negara, terutama memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih responsif dan profesional. Pendekatannya menekankan efektivitas lembaga publik, koordinasi antarkementerian, dan peningkatan akuntabilitas. Upayanya memberi kontribusi penting bagi penguatan struktur pemerintahan pada fase akhir Orde Baru. (Hill, 1996:134)

## 10. Wardiman Djojonegoro (1934–Sekarang)



**Wardiman Djojonegoro** merupakan tokoh penting dalam pembaruan sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Kepemimpinannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong modernisasi kurikulum, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan lembaga pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Tilaar, 1999:54)

Dalam menjalankan tugasnya, Wardiman menekankan pentingnya keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Ia memperluas program pendidikan kejuruan, meningkatkan pelatihan guru, dan memperkuat riset akademis. Langkah-langkah ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan ekonomi serta kebutuhan tenaga kerja terampil. (Bjork, 2005:76)

Wardiman juga berperan dalam menata ulang manajemen pendidikan agar lebih efektif dan terkoordinasi. Ia memperbaiki tata kelola anggaran, memperkuat evaluasi mutu pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Reformasi tersebut meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia pada era akhir Orde Baru. (Darmaningtyas, 2004:101)

### Daftar Referensi

- Bjork, C. (2005). *Indonesian Education: Teachers, Schools, and Central Bureaucracy*. New York, NY: Routledge.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London, UK: Palgrave Macmillan.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.
- Elson, R. E. (2001). *Suharto: A Political Biography*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kahin, G. M. T. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Liddle, R. W. (1999). *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- MacIntyre, A. (1993). *Business and Politics in Indonesia*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.